

## ABSTRAK

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *Yuridis Empiris*, dimana dalam pengumpulan data yang ada dilapangan dengan cara wawancara terhadap pihak dan instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaji dengan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan , kaidah hukum maupun teori ilmu hukum.

Dalam penelitian ini didapatkan hasil yang pada pokoknya : Akibat Hukum Verifikasi dan Validasi terhadap BPHTB oleh DPPKAD terhadap Akta PPAT di Kabupaten Tegal adalah : (1) Akibat hukum dari sistem verifikasi dan validasi pembayaran BPHTP yang diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2012 mengenyampingkan prinsip *Self Assesment* karena perhitungan wajib pajak tidak diakui oleh petugas dalam menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Sehingga Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2012 tidak sesuai dengan dengan peraturan perundangan yang berada diatasnya, sehingga dapat dibatalkan demi hukum. (2) Akta PPAT selama memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, serta dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dengan berdasarkan undang-undang sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai hukum yang mengikat sebagaimana kekuatan hukum akta otentik, meskipun tidak dilaksanakan dalam verifikasi dan validasi penentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Asset Daerah di Kabupaten Tegal.

Kata kunci : **Akibat Hukum, Verifikasi dan Validasi, BPHTB**

## ABSTRACT

This research has resulted in essence: Effects Verification And Validation Tax on Acquisition of Land and Buildings by the Board of Management of Local Revenue Of Deed PPAT In Tegal is: (1) The legal consequences of system verification and validation of the payment BPHTB set out in the decree No. 32 of 2012 eliminates the Self Assessment system principles for Taxpayers can no longer calculate and pay its tax debt by himself. So Regulation decree No. 32 of 2012 About About Tax on Acquisition of Land and buildings are not in accordance with the rules contained in Government Regulation No. 91 Year 2010 on Tax Type Blood uncollected Based Determination of Regional Head or Paid Alone by taxpayers, so it can be canceled by operation of law. (2) Deed PPAT for eligible legality agreement as in Article 1320 of the Civil Code, as well as made by the competent authority on the basis of a law as Article 1868 of the Civil Code have binding legal force as the force of law deed of the authentic, although it can not be done when the Verification and Validation Tax on Acquisition of Land and Buildings by the Department of Revenue Management and Asset Finance.

Keywords: **Effects, Verification and Validation, BPHTB**